

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Ringkasan Inflasi Triwulan I

Secara keseluruhan, inflasi di Maluku pada penutupan Triwulan I 2026 menunjukkan tren melandai signifikan setelah sempat mengalami tekanan tinggi di awal tahun.

- Inflasi Tahunan (*y-on-y*): Pada Maret 2026, inflasi Maluku tercatat sebesar 3,40%. Angka ini turun tajam dibandingkan Februari 2026 yang sempat menyentuh 5,97%.
- Inflasi Bulanan (*m-to-m*): Pada Maret 2026, Maluku justru mengalami deflasi sebesar 0,75%, yang menandakan adanya penurunan harga pada beberapa komoditas utama setelah masa puncak konsumsi.
- Perbandingan Kota IHK:
 - Kota Tual: Mengalami inflasi tertinggi sebesar 5,69%.
 - Kabupaten Maluku Tengah: Sebesar 3,44%.
 - Kota Ambon: Terendah di Maluku, yakni 3,19%.

2. Perkembangan Harga Barang & Jasa

Dinamika harga selama Triwulan I 2026 dipengaruhi oleh beberapa kelompok pengeluaran utama:

a. Barang Kebutuhan Pokok & Penting (Bapokting)

- Komoditas Perikanan: Menjadi penyumbang utama fluktuasi. Ikan layang (momar), ikan tongkol (komu), dan ikan cakalang seringkali memicu inflasi di Kota Tual dan Ambon akibat faktor cuaca yang mempengaruhi hasil tangkapan nelayan.
- Pangan Pokok: Harga beras, bawang merah sempat menekan inflasi di awal triwulan (Januari-Februari), namun mulai stabil di Maret seiring masuknya masa panen di beberapa sentra produksi dan intervensi pasar oleh pemerintah daerah.

b. Barang Lainnya & Jasa

- Energi & Rumah Tangga: Kelompok perumahan, air, dan listrik memberikan andil inflasi tahunan yang besar (mencapai **13,28%** di awal tahun), didorong oleh perbedaan harga tarif listrik yang di tahun 2025 mendapatkan subsidi dan di tahun 2026 tidak ada subsidi.
- Transportasi: Tarif angkutan udara dan harga bensin tetap menjadi penyumbang inflasi, sementara tarif angkutan laut sempat memberikan andil deflasi pada Maret 2026.

3. Risiko dan Tantangan ke Depan

Memasuki Triwulan II 2026, beberapa risiko yang perlu diwaspadai adalah:

- Faktor Musiman & Cuaca: Perubahan cuaca ekstrem di perairan Maluku dapat mengganggu pasokan ikan dan distribusi barang antar pulau, yang merupakan pemicu

utama inflasi lokal.

- Tekanan Global: Pelemahan nilai tukar Rupiah (yang sempat mendekati Rp17.000 per USD) berpotensi meningkatkan harga barang yang didatangkan dari luar daerah (*imported inflation*), seperti pakan ternak, tepung, dan barang elektronik.
- Biaya Transportasi: Fluktuasi harga avtur global dapat memicu kenaikan tarif tiket pesawat, yang sangat krusial bagi konektivitas di wilayah kepulauan seperti Maluku.
- Kepatuhan Regulasi: Implementasi penuh sertifikasi halal pada tahun 2026 diprediksi memberikan tambahan biaya operasional bagi pelaku usaha mikro di sektor makanan/minuman.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan inflasi di Maluku bukan sekadar masalah moneter, melainkan masalah multidimensi yang menggabungkan faktor geografi, cuaca, dan infrastruktur logistik. Pengendalian yang efektif memerlukan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjamin kepastian pasokan. Terdapat beberapa permasalahan mendasar dalam pengendalian inflasi di Maluku yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah (TPID)

1. Masalah Distribusi dan Konektivitas (Karakteristik Kepulauan)

Sebagai provinsi kepulauan, Maluku sangat bergantung pada kelancaran transportasi laut dan udara.

- Ketergantungan pada Luar Daerah: Sebagian besar komoditas bahan pokok (seperti beras, gula, dan bawang) masih didatangkan dari luar Maluku (Sulawesi atau Jawa). Gangguan pada jalur logistik nasional langsung berdampak pada stok lokal.
- Biaya Logistik Tinggi: Biaya angkut antar pulau yang mahal menyebabkan disparitas harga yang signifikan antara ibu kota provinsi (Ambon) dengan wilayah kabupaten terpencil.
- Konektivitas Udara: Fluktuasi harga tiket pesawat (tarif angkutan udara) sering kali menjadi penyumbang tetap inflasi di Maluku karena terbatasnya pilihan maskapai dan tingginya biaya operasional.

2. Dominasi Komoditas Perikanan (Volatile Foods)

Ikan merupakan komoditas utama masyarakat Maluku, namun ketersediaannya sangat rentan.

- Faktor Cuaca: Produksi ikan sangat bergantung pada musim dan kondisi gelombang laut. Saat cuaca buruk, pasokan ikan di pasar menurun drastis, memicu lonjakan harga yang signifikan (seperti pada komoditas Ikan Selar/Momar dan Tongkol).
- Kurangnya Sarana Penyimpanan: Keterbatasan fasilitas *cold storage* yang memadai di tingkat nelayan lokal membuat stok ikan tidak bisa disimpan dalam jangka panjang untuk menstabilkan harga saat musim paceklik.

Masalah Struktural dan Produksi Lokal

- Belum Mandiri Pangan: Produksi hortikultura lokal (seperti cabai dan bawang) belum mampu memenuhi kebutuhan domestik secara konsisten sepanjang tahun, sehingga harga sering melonjak saat pasokan dari luar daerah terhambat.
- Rantai Pasok yang Panjang: Panjangnya rantai distribusi dari pengepul hingga ke pedagang eceran di pasar tradisional menambah margin harga yang harus dibayar konsumen.

4. Tekanan Ekonomi Makro dan Eksternal

- Nilai Tukar Rupiah: Pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS (yang sempat mendekati Rp17.000 pada awal 2026) meningkatkan biaya *imported inflation*, terutama untuk barang-barang manufaktur dan bahan baku pakan ternak yang didatangkan dari luar.
- Harga Energi: fluktuasi harga BBM nonsubsidi berdampak langsung pada kenaikan biaya operasional industri rumah tangga dan jasa di Maluku.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Maluku sepanjang Triwulan I 2026 (Januari – Maret) difokuskan pada penguatan strategi **4K** (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).

Berikut adalah detail implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku dan Bank Indonesia:

1. Keterjangkauan Harga: Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Murah “KOPI PANAS”.

Pemerintah daerah secara intensif menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah di berbagai titik strategis (seperti Lapangan Merdeka, Ambon; Pasar Binaia, Masohi dan Taman Landmark, Langgur) untuk menekan harga komoditas pangan yang melonjak akibat persiapan Ramadan dan Idul Fitri 1447 H.

- Komoditas yang Dijual: Beras SPHP, minyak goreng (Minyakita), bawang merah, bawang putih, cabai, telur ayam, dan daging ayam beku.
- Harga: Dijual di bawah harga pasar (misalnya paket sembako Rp100.000 atau beras SPHP Rp60.000 per 5 kg) untuk membantu daya beli masyarakat dan mencegah *panic buying*.

Selain melaksanakan Gerakan Pangan Murah, TPID Provinsi Maluku bekerjasama dengan Kanwil Bulog Maluku Malut, Ritel Modern Alfamart Waehaong juga melaksanakan operasi Pasar Murah “KOPI PANAS” (Toko Pengendalian Inflasi Pangan Strategis) di Pasar Mardika dan Pasar Batu Merah Kota Ambon.

2. Ketersediaan Pasokan: Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD)

Mengingat Maluku adalah daerah kepulauan yang sangat bergantung pada pasokan luar, TPID

memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah sentra produksi di Sulawesi dan Jawa.

- Fokus utamanya adalah memastikan aliran pasokan beras dan komoditas hortikultura (cabai, bawang) tidak terputus di tengah ketidakpastian kondisi cuaca (musim barat) yang sering mengganggu jadwal pelayaran.

3. Kelancaran Distribusi: Pemantauan Stok dan Jalur Logistik

- Sidak Pasar: Bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk memantau gudang-gudang distributor guna mencegah penimbunan barang, dan sidak di pasar-pasar tradisional dan ritel modern untuk memantau harga bapak di tingkat pengecer.
- Distribusi Perikanan: Mengingat komoditas ikan sering menjadi pemicu inflasi lokal di Maluku, pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan bekerjasama dengan Unit Pengelohan Ikan (UPI) melakukan penjualan ikan beku ke pemukiman dan pasar-pasar tradisional serta memantau distribusi tangkapan nelayan dari pusat pendaratan ikan (PPI) ke pasar-pasar tradisional seperti Pasar Arumbae untuk menjaga kestabilan harga saat frekuensi melaut berkurang karena gelombang tinggi.

4. Komunikasi Efektif

- High Level Meeting : Melaksanakan *High Level Meeting* TPID Provinsi Maluku dan TPID Kabupaten/Kota se-Maluku menjelang HBKN Idul Fitri 2026 guna memantau ketersediaan stok dan harga bapak di Kabupaten/Kota dan harga BBM di Maluku.
- Edukasi Masyarakat: Mengimbau masyarakat melalui berbagai media untuk berbelanja secara bijak dan tidak menimbun bahan pangan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Secara umum, efektivitas kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan I 2026 dinilai berhasil meredam lonjakan ekstrem, namun masih menyisakan tantangan pada komoditas tertentu dan masih adanya ketimpangan pengendalian inflasi antara Kota Ambon (inflasi rendah 3,19%) dengan Kota Tual (inflasi Tinggi 5,69%). Hal ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan belum merata secara geografis di seluruh wilayah kepulauan Maluku.

- Keberhasilan mencatatkan deflasi sebesar 0,75% pada Maret 2026 adalah indikator positif bahwa intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah “KOPI PANAS” dan stabilitas pasokan beras SPHP berjalan efektif.
- Penurunan inflasi tahunan dari 5,97% (Februari) menjadi 3,40% (Maret) menunjukkan bahwa tekanan harga di tingkat konsumen mulai melandai secara signifikan dibandingkan awal tahun.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk mempertahankan momentum stabilisasi harga, langkah-langkah berikut perlu diperkuat:

Replikasi GPM dan Operasi Pasar Murah “KOPI PANAS” ke Kabupaten IHK lain: Fokus

1. GPM dan KOPI PANAS harus diperluas ke wilayah di luar Ambon, khususnya Kota Tual dan Maluku Tengah, untuk menekan disparitas harga.
2. Modernisasi Logistik Perikanan: Mendorong investasi pada *cold storage* bertenaga surya untuk membantu nelayan menyimpan hasil tangkapan, sehingga pasokan ikan tetap terjaga meski cuaca buruk.
3. Optimalisasi Subsidi Transportasi: Mempertimbangkan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk subsidi ongkos angkut komoditas pangan esensial dari pelabuhan ke pasar-pasar pedalaman.
4. Mitigasi Risiko Global: Mengingat nilai tukar Rupiah yang fluktuatif (mendekati Rp17.000/USD), TPID perlu mengantisipasi kenaikan harga barang manufaktur dan pakan ternak yang akan berdampak pada harga telur dan daging ayam.